

ABSTRAKSI

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta Autentik, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, selain terikat dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris juga terikat dengan Kode Etik Notaris, yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi para Notaris ,yang diakui oleh Undang-undang. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Pusat, majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis pelanggaran Kode Etik apa saja yang dilakukan oleh oleh Notaris di Kabupaten Cirebon, dan menganalisis jenis sanksi apa saja yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan dari beberapa jenis ketentuan Kode Etik Notaris, beberapa pelanggaran yang terjadi di kabupaten Cirebon diantaranya adalah meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari, menggunakan jasa perantara dalam mendapatkan klien, pemasangan papan nama yang tidak sesuai, publikasi dan promosi diri, dan menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan undang-undang atau cenderung lebih murah dari Notaris lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya karena kontradiktifnya peraturan tertulis dengan kondisi di lapangan yang menyebabkan Notaris harus berjuang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di satu sisi, sementara di sisi lain mereka terikat serangkaian peraturan yang membatasi mereka dalam mendapatkan klien atau masyarakat pengguna jasa mereka. Mereka disebut Sebagai Pejabat Publik, sementara mereka tidak diijinkan mempromosikan diri mereka, mereka Pejabat Publik, tapi mereka tidak digaji oleh Negara sebagaimana Pejabat Publik lainnya, sementara jumlah Notaris setiap tahun semakin bertambah, dan pastinya terjadi persaingan diantara mereka, dan hal ini acapkali akan berbenturan dengan kode etik Notaris, sehingga mau tidak mau, secara sengaja ataupun tidak disengaja mereka akan melanggar Kode Etik Notaris. Selain hal-hal tersebut, sanksi yang diterapkan oleh majelis Pengawas Notaris yang hanya bersifat administratif, menyebabkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris masih kerap terjadi dan kurang adanya efek jera.

Kata kunci : Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas Daerah, sanksi administratif

ABSTRACT

Notary as a General Officer authorized to make an Authentic deed, in carrying out his duties and authorities, in addition to being bound by Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, the Notary is also bound by the Notary Code of Ethics, made by the Indonesian Notary Association (INI) organization, as the only organization that houses the Notaries, which is recognized by the Law. In carrying out its duties and authorities, the Notary is supervised by the Minister of Law and Human Rights by forming a Notary Supervisory Board, namely the Central Supervisory Board, the Regional Oversight Council, and the Regional Oversight Council. The purpose of this study was to analyze the types of violations of the Code of Ethics carried out by Notaries in Cirebon Regency, and also to analyze the types of sanctions imposed by the Regional Oversight Council on the violation of the Notary's Code of Ethics.

The results of the study show that from several types of provisions of the Notary Code of Ethics, several violations that occurred in Cirebon district included leaving the office for more than seven days, using intermediary services in obtaining clients, installing inappropriate signboards, publications and self-promotion, and applying tariffs. which is not in accordance with the law or tends to be cheaper than other Notaries.

Based on the results of the study it can be concluded that some of the factors causing these violations are due to the contradictory written regulations with the conditions on the ground that causes Notaries to struggle in carrying out their duties and authorities on the one hand, while on the other hand they are bound to a series of regulations which limit them in obtaining client or community of their service users. They are called as Public Officers, while they are not permitted to promote themselves, they are Public Officials, but they are not paid by the State as other Public Officials, while the number of Notaries every year is increasing, and certainly there is competition between them, and this will often clash with the Notary's code of ethics, so that inevitably or unintentionally they will violate the Notary's Code of Ethics. In addition to these matters, the sanctions imposed by the Notary Supervisory Board are only administrative, causing violations of the Notary Code of Ethics that often occur and lack of deterrent effect.

Keywords: Notary Ethics Code, Regional Oversight Council, administrative sanctions